

# CYBERPOLITICS DALAM AKTIVISME POLITIK DIGITAL UNTUK MENJANGKAU PARTISIPASI PUBLIK

Syauiid Alamsyah<sup>1\*</sup> & Ridwan<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Pembangunan Veteran Jakarta,

<sup>2</sup> Dosen Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Pembangunan Veteran Jakarta.

Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat 12450

\*Korespondensi: [saidalamsyah22@gmail.com](mailto:saidalamsyah22@gmail.com)

## Abstract

*The transformation of the digital era has brought changes to the study of political science into the cyber realm. The pace of information and technology development has also brought changes to the socio-political behavior of society. Political activism also transformed into a virtual form. Public space which is a medium for conveying forms of demonstrations or political participation is now experiencing a change to cyber space. Political cyber becomes a new perspective in the form of democracy. Social interactions, political activities, political participation, and political campaigns are considered to be more effective in reaching audiences. The purpose of this study is to understand the phenomenon of activism and public participation in cyberpolitics. Political activism such as group action (collectivized collective action) and individualized collective action, or what is known as consensus mobilization is now shifting to cyber space. Deeper than that, cyberpolitics can be said to be a cloning of real political and democratic life in which every individual has a sense of equal rights so that whatever is in the mind, political image, or feelings of dissatisfaction with the government's performance can be expressed in cyber space. In conclusion, in this study the researcher explains and answers from a political perspective how modernization produces technological advances which are followed by social and political changes in society, so that in the future cyberpolitics will become a new treasure of interest to study.*

**Keywords:** Cyberpolitics, Political Activism, Public Participation

## Abstrak

Transformasi era digital membawa perubahan terhadap kajian ilmu politik ke dalam ranah siber. Laju perkembangan informasi dan teknologi juga membawa perubahan terhadap perilaku sosial politik pada masyarakat. Aktivisme politik ikut bertransformasi ke dalam bentuk virtual. Ruang publik yang menjadi media penyampaian bentuk demonstrasi ataupun partisipasi politik kini mengalami perubahan ke ruang siber. Siber politik menjadi sebuah perspektif baru dalam bentuk demokrasi. Interaksi sosial, kegiatan politis, partisipasi politik, dan kampanye politik menjadi hal yang dinilai lebih efektif dalam menjangkau khalayak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami fenomena aktivisme dan partisipasi publik dalam lingkup *cyberpolitics*. Aktivisme politik seperti tindakan kelompok (*collectivized collective action*) dan tindakan individu yang dilakukan bersama-sama (*individualized collective action*), atau yang disebut sebagai *consensus mobilization* kini bergeser ke ruang siber. Lebih dalam dari itu, *cyberpolitics* dapat dikatakan sebagai *cloning* dari kehidupan politik dan demokrasi secara nyata yang di dalamnya setiap individu memiliki rasa kesetaraan hak sehingga apapun yang ada didalam pikiran, citra politik, maupun perasaan ketidakpuasan atas kinerja pemerintah dapat diekspresikan dalam ruang siber. Kesimpulannya, dalam kajian ini peneliti menjelaskan dan

menjawab dalam perspektif politik bagaimana modernisasi menghasilkan kemajuan teknologi yang diikuti dengan perubahan sosial politik masyarakat, sehingga kedepannya *cyberpolitics* akan menjadi khazanah baru yang menarik diteliti.

**Kata Kunci:** Cyberpolitics, Aktivisme Politik, Partisipasi Publik

## PENDAHULUAN

Laju perkembangan teknologi mengalami pertumbuhan yang cepat dan dinamis melalui globalisasi. Dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) antar negara dengan kemajuan digital. Setiap individu bebas melalangi untuk mencari informasi apapun tanpa ada yang membatasi dirinya. Perubahan yang cepat dalam masyarakat menjadi tantangan negara manapun untuk beradaptasi menghadapi sisi negatifnya. Dalam negara demokrasi, siber menjadi medium untuk kebebasan berekspresi setiap individu maupun secara kolektif. Sebab demikian, *cyberpolitics* menjadi sebuah paradigma baru dalam memahami dunia nyata yang berubah dalam medium siber yang kini beralih menjadi tempat interaksi sosial masyarakat, kegiatan politis, transaksional bisnis, institusi negara, dan sosial budaya yang terdigitilasi.

Penulis memahami *cyberpolitics* menjadi perspektif kekinian dalam kajian politik yang dapat memahami perilaku politik (*politic behaviour*). Hal ini berdasarkan ruang lingkup *cyberpolitics* yang tak terbatas dan dapat menjangkau banyak individu, kelompok, bahkan negara. Permasalahan yang muncul dalam lingkup komunikasi, sosial budaya, keamanan, pertahanan, hingga ke pendidikan di dunia siber akan menjadikan *cyberpolitics* sebagai sebuah instrumen untuk menganalisis dan mengkaji terhadap banyak sektoral didalam lini bernegara yang beralih fungsi menjadi digital seperti *e-government*, *e-edutech*, *e-election*, dan sebagainya.

Penggunaan *cyberpolitics* pada mulanya hanya sebatas terkait keamanan

dan pertahanan negara. Ancaman tersebut berupa ideologi terorisme dan radikalisme yang menyebarkan pahamnya lewat dunia digital. Ancaman di dunia *cyber* memang bersifat tidak terlihat (*intangible*) dan memanfaatkan ruang siber (*cyber space*) untuk melakukan tindak kejahatan. Smith dalam tulisannya mengungkapkan bahwa *cyber space* memiliki manfaat positif yakni memberikan kemudahan interaksi sosial akan tetapi memiliki sisi negatif juga yang berupa ancaman keamanan untuk penggunaannya baik individu, organisasi, pemerintahan atau pengusaha, baik sengaja maupun tidak untuk mendapatkan keuntungan finansial, militer, politik, atau lainnya (Smith, 2015).

Fakta sebuah riset mengungkapkan bahwa separuh penduduk Indonesia “melek” media sosial atau aktif menggunakannya. Dalam laporan berjudul *Digital 2021: The Latest Insights Into The State of Digital* itu, disebutkan bahwa dari total 274,9 juta penduduk di Indonesia, 170 juta di antaranya telah menggunakan media sosial. Dengan demikian, angka penetrasinya sekitar 61,8 persen. Angka pengguna aktif media sosial di Indonesia tersebut tumbuh sebesar 10 juta atau sekitar 6,3 persen dibandingkan bulan Januari 2020. Dalam periode yang sama, pengguna internet di Indonesia tumbuh 27 juta atau 15,5 persen menjadi 202,6 juta (Kompas, 2022). Dari data tersebut menjadi sebuah refleksi bahwa penduduk di Indonesia sebagian besar telah melek teknologi. Penggunaan ruang siber dengan platform media sosial tak lagi hanya memiliki fungsi mengirimkan informasi atau bertukar pesan, akan

tetapi juga interaksi sosial dan respons sosial terhadap suatu fenomena atau isu politik.

Pendekatan *cyberpolitics* yang masih terbilang baru dalam penelitian kontemporer ini, masih banyak hal yang dapat dikaji dan ditinjau bahkan dieksplorasi lebih jauh proses digitalisasi perilaku politik ke dalam ruang siber. Aktivisme politik ataupun gerakan sosial dari *civil society* di ruang siber memungkinkan preferensi politik individu maupun kelompok terhadap suatu isu politik menghasilkan partisipasi publik yang jauh lebih besar. Digitalisasi kewarganegeraan dan hak asasi manusia atas kesetaraan membuka lebih besar perdebatan dan konflik antara individu atau kelompok yang pro terhadap suatu isu maupun yang kontra terhadap isu saling mengekspresikan dalam konteks demokrasi.

Aktivisme modern di media sosial ini menjadi fenomena yang menarik dimana pergeseran dalam penyampaian atau ajakan secara virtual. Media sosial menjadi “ruang publik baru” seperti media yang populer di masyarakat yakni *facebook*, *twitter*, dan Instagram. Era siber yang semua terhubung dengan mesin dan internet, percepatan industrialisasi, dan digitalisasi komunikasi telah membuka ruang baru untuk setiap individu untuk memanfaatkan dengan kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perubahan, pergerakan bahkan perlawanan. Perilaku dari masyarakat yang memanfaatkannya pun tak bisa dipungkiri melakukan komunikasi secara digital dengan berbagai bentuk seperti status, video serta foto. Percepatan arus teknologi informasi, terutama pada media sosial telah memberikan sarana yang luas bagi masyarakat untuk mengekspresikan sikap mereka, baik itu dalam bentuk gerakan sosial baru maupun sebagai

pengontrol terhadap perilaku para pejabat atau politisi.

Dalam perspektif *cyberpolitics*, aktivisme digital dalam ruang siber secara tujuan substansi tidak ada perbedaan dengan aktivisme konvensional, Realisasi aktivisme digital dengan cara menarik partisipasi publik dengan meminta dukungan sosial, partisipasi dengan bentuk-bentuk seperti *re-tweet*, memberikan *like*, ataupun *share* serta dengan cara petisi digital. Di Indonesia, beberapa gerakan sosial ataupun aktivisme digital mulai mengalami peningkatan untuk melakukan *influence* atau secara persuasif meminta partisipasi publik. Contohnya ketika, pandemi melanda dunia dan Indonesia, aktivisme digital untuk mencegah dan mengajak masyarakat ikut peran disebarkan melalui *tagline* dan *hashtag* yang dipopulerkan oleh influencer seperti gerakan *#dirumahaja*, yang mencapai 27.900.000 hit pencarian melalui Google.

Bahkan, aktivisme digital yang kini didukung oleh berbagai platform teknologi canggih. Menilik ke sejarah di Indonesia, aktivisme melalui perantara digital telah digunakan oleh mahasiswa untuk memobilisasi pada tahun 1998 menjatuhkan rezim pada saat itu. Dalam artikelnya, Lim mengatakan bahwa:

“Internet pada akhirnya, membantu menguatkan gerakan mahasiswa anti Suharto pada tahun 1998. Para mahasiswa Menggabungkan aktivisme online dan offline, menggunakan berbagai cara komunikasi yang tidak dikontrol secara terbuka oleh pemerintah telepon, faks, telepon seluler, dan khususnya e-mail para siswa dan berbagai pihak lain melakukan mobilisasi banyak orang untuk datang ke jalan-jalan dan menempati taman, plaza, dan bagian depan gedung-gedung

pemerintah untuk memaksa Presiden Soeharto untuk mundur” (Lim, 2013).

Dengan demikian, kepopuleran dari bentuk aktivisme modern di ruang siber yang banyak digunakan oleh individu ataupun kelompok dalam mengkampanyekan perubahan. Menjadi medium baru dimana media sosial menjadi perantara yang efektif. Meskipun dalam sudut pandang *cyberpolitics*, dalam melakukan aktivisme digital juga ada kemungkinan untuk berita-berita bohong atau biasa dikenal *hoax* ataupun oknum-oknum yang memanfaatkan yang begitu beresiko menghilangkan tujuan dan esensi dari sebuah aktivisme. Dimana kesukarelawanan juga menjadi nilai penting atas apa yang menjadi isu yang ingin dirubah dalam suatu gerakan. Oleh karena itu, dari penjelasan diatas, menilai bahwa *cyberpolitics* dan aktivisme politik dalam menjangkau partisipasi publik menjadi suatu kebaruan yang menarik untuk diteliti.

## METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dengan demikian metodologi ini dapat digunakan karena dapat mencakup berbagai isu sosial dan mampu memberikan penjelasan, melakukan analisis, dan memberikan pemahaman terhadap berbagai fenomena sosial yang terjadi. Metode kualitatif digunakan karena dapat mencakup berbagai isu sosial dan mampu memberikan penjelasan, melakukan analisis, dan memberikan pemahaman terhadap berbagai fenomena sosial yang terjadi (Dantes, 2012). Penulis disini menggunakan studi kajian pustaka (*library research*) dalam mengumpulkan data-data primer untuk melakukan pemecahan masalah terkait *cyberpolitics* dalam perspektif demokrasi sebagai

tantangan menjaga kebebasan berekspresi dari politik identitas. Desain penelitian yang bersifat deskriptif juga dapat dimaknai sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1997).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Cyberpolitics*

Menurut Jerry Indrawan *cyberpolitics* di era Revolusi Industri 4.0 ini akan menjadi medium utama aktivitas dan interaksi politik. Semua stake holder politik, yang ingin dipilih maupun memilih, apalagi yang akan mengejar kepentingan-kepentingan politik tertentu, pasti akan bermain lewat *cyberpolitics*. Politik akan mendapatkan keuntungan maksimal dari pertalian antara dunai nyata dengan dunia maya ini. Sebuah realitas konstruktif akan terjadi sehingga kajian-kajian politik yang sifatnya ilmiah, maupun praktis, akan mendapatkan sarana bermain yang sangat luas. Untuk itu, dibutuhkan sebuah perspektif yang baru dalam proses pemahaman kita (Indrawan, 2019).

Menurut Nazli Choucri, *cyberpolitics* adalah sebuah terminologi yang diciptakan, berkaitan dengan interaksi manusia (politik) yang meliputi kegiatan-kegiatan, seperti siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana, yang dimungkinkan untuk terjadi melalui ranah ruang siber sebagai sebuah arena baru pertarungan dengan pengandai-andaian dan realitanya sendiri. Meskipun ada perbedaan dalam perspektif di seluruh dunia, namun tetap terdapat pemahaman ilmiah umum tentang arti "politik". Kompleksitas yang muncul terkait awalan "cyber" itulah yang

membedakan semantik yang baru dibangun ini (Choucri, 2012).

Menurut Clark dalam Choucri (2012), berpandangan bahwa dunia maya sebagai sebuah sistem kontingen hierarkis yang memiliki empat unsur pendukung, yakni:

1. Fondasi fisik dan infrastruktur yang memungkinkan permainan di bidang siber
2. Blok bangunan logis yang mendukung platform fisik dan mengaktifkan layanan,
3. Konten informasi yang disimpan, ditransmisikan, atau ditransformasikan, dan
4. Aktor, entitas, dan pengguna dengan berbagai kepentingan yang berpartisipasi dalam arena ini dalam berbagai peran. Semua lapisan, fungsi, dan entitas ini relevan dengan politik siber.

Menurut penulis, *cyberpolitics* merupakan sebuah aktivitas politik yang berpindah medium di ruang siber. Sama seperti halnya aktivitas di dunia realitas, *cyberpolitics* juga berisi agenda-agenda politis bagi aktor politik di dalamnya, atau fungsi-fungsi politik bagi institusi politik seperti partai politik yang menjalankan fungsinya di ruang siber. Hal ini tidak lain karena pergeseran budaya di masyarakat dan jangkauan ruang siber yang lebih luas, sehingga proses-proses politik juga beradaptasi untuk terdigitalisasi (Choucri (2012).

### ***Aktivisme Digital***

Dalam Bukunya, yang berjudul “Digital Activism Decoded The New Mechanics of Change”, konteks aktivisme digital mengacu pada teknologi digital yang digunakan dalam kampanye dan aktivisme tertentu dan pada konteks ekonomi, sosial, dan politik dimana penggunaan teknologi tersebut terjadi. Infrastruktur teknologi digital

kombinasi dari jaringan, kode, aplikasi, dan perangkat yang membentuk infrastruktur fisik aktivisme digital adalah titik awal tetapi bukan titik akhir. Perbedaan dalam faktor ekonomi, sosial, dan politik pada akhirnya (akan) mengubah cara aktivis menggunakan teknologi ini (Joyce, 2010b).

Terminologi dan frasa “aktivisme digital” juga hingga kini masih menjadi perdebatan secara akademis. Meskipun demikian, “digital” dalam hal ini disepakati sebagai potensi kecepatan, reliabilitas, skala, dan biaya rendah yang ditawarkan teknologi digital, dan hal ini memungkinkan terjadinya perluasan jangkauan dan ruang lingkup aktivisme kontemporer. Istilah aktivisme digital kemudian dapat merujuk pada serangkaian kegiatan ataupun kampanye yang menggunakan teknologi dan jaringan digital secara komprehensif dan eksklusif. Komprehensif dalam hal ini mencakup semua praktik kampanye sosial dan politik yang menggunakan infrastruktur jaringan digital; eksklusif berarti tidak termasuk bentuk-bentuk praktik aktivisme lain yang menggunakan teknologi, namun tidak tersambung dalam sebuah infrastruktur jaringan digital (Joyce, 2010a).

Dalam Bukunya, yang berjudul “Digital Activism Decoded The New Mechanics of Change”, Marry Joyce mengatakan faktor politik juga mempengaruhi aktivisme. Dalam masyarakat demokratis dan semi-demokratis, di mana warga negara memiliki pengaruh yang berarti atas tindakan pemerintah mereka, konteks politik aktivisme digital dapat dipahami dari segi hukum dan regulasi. Namun, pemerintah yang represif dan otoriter tidak membatasi diri pada jalur hukum saat membentuk lingkungan aktivisme digital. Di negara-negara ini, bahkan para aktivis yang memiliki akses ke teknologi digital pun kesulitan

menggunakannya karena batasan yang diberlakukan pemerintah. Pemerintah ini melacak pidato politik online dan memblokir aplikasi yang digunakan oleh aktivis digital. Seringkali penghalang online seperti itu mengarah pada penganiayaan offline dan bahkan pemenjaraan (Joyce, 2010a).

Dalam perspektif lintas disiplin, Chon dan Park (2020), mengidentifikasi aktivisme media sosial sebagai fenomena sosial di mana terdapat:

- (i) Isu yang diperdebatkan,
- (ii) Tindakan kolektif,
- (iii) Solidaritas atas identitas kolektif, dan
- (iv) Adanya upaya untuk menyelesaikan masalah melalui komunikasi.

Tindakan dan solidaritas kolektif itu sendiri oleh Micheletti (2004), dibedakan dalam tindakan kelompok (*collectivized collective action*) dan tindakan individu yang dilakukan bersama-sama (*individualized collective action*), atau yang oleh Foster et al (2019) disebut sebagai *concensus mobilization*.

### **Cyberpolitics Dalam Aktivisme Politik Digital Terhadap Partisipasi Publik**

Membahas *cyberpolitics* yang menjadi suatu kajian baru, memang memiliki lingkup kajian yang masih terbatas karna masih sedikit para peneliti yang membahas terkait bagian dari keilmuan ini. Dalam penelitian kali ini, yang juga menjadi bagian dari *cyberpolitics* yakni aktivisme politik digital menjadi diskursus yang menarik yang kaitannya dengan transformasi dari gerakan sosial ke dalam ranah virtual. Menariknya apakah publik atau masyarakat sipil di Indonesia ikut berpartisipasi atau tidak tertarik dalam berpartisipasi. Meskipun angka melek teknologi dan penggunaan media sosial di Indonesia terbilang tinggi, tapi lain

halnya dengan sebuah gerakan sosial yang atau tindakan aktivisme yang memberikan sebuah pertanyaan bagaimana tingkat partisipasi publik di dalamnya.

Sebelum itu, pada konferensi Gov 2.0 September 2009 di Washington, DC, John Podesta, mantan kepala staf Pres. Bill Clinton, mengatakan dia menganggap teknologi komunikasi yang muncul sebagai "alat pemberdayaan" mengacu pada penggunaannya oleh warga negara di mana ekspresi politik dibatasi. Pada konferensi yang sama, Carl Malamud, "kita sekarang menyaksikan gelombang perubahan". Gelombang internet dimana pondasi dan mesin pemerintahan digunakan tidak hanya oleh birokrat dan pegawai negeri, tetapi juga oleh masyarakat." (Joyce, 2010b).

Sistem politik yang kita kenal ini dimana *output* yang dikeluarkan pemerintah baik berupa sebuah kebijakan, peraturan, ataupun pelayanan publik. Terdapat suatu kontradiksi penolakan atau ketidaksetujuan di dalam masyarakat demokratis. Penyampaian hal tersebut yang bertujuan merubah terhadap pemangku kepentingan atau birokrat pemerintah yang dikenal dengan *input*, dilakukan dalam bentuk aktivisme politik. Perbedaan pendapat, dan penggalangan pendapat yang senada untuk menarik partisipasi biasanya dilakukan secara konvensional oleh kelompok kepentingan ataupun kelompok penekan. Akan tetapi, perubahan ketiga karna kemajuan dan gelombang internet, perencanaan kampanye dari gerakan sosial tersebut tak lagi melalui brosur atau pamflet yang menuliskan tuntutan dan dibagikan di ruang-ruang publik akan tetapi dengan cara virtual atau digital, sekali saja membagikan gambar atas tuntutan tersebut semua masyarakat pengguna media sosial dapat melihatnya.

Keputusan partisipasi publik inilah menjadi penentu, tergantung apakah tuntutan tersebut merupakan representatif dari ketidakpuasannya atau berpandangan sebaliknya. Inilah yang menjadi kontradiksi dalam partisipasi publik terhadap aktivisme digital. Di dalam ruang siber terjadi perbedaan pendapat secara kolektif dan akan terus berkembang menjadi sebuah tuntutan yang jika pembicaraan atas aktivisme politik tersebut semakin banyak dibicarakan maka akan menarik masyarakat lainnya untuk bersikap pro, kontra, ataupun netral. Ini menunjukkan bahwa jalan dalam masyarakat terbuka dan demokratis akan berbeda secara substansial dari jalan di negara-negara di mana pemerintah menekan perbedaan pendapat.

Aktivisme politik secara digital di Indonesia memang secara kepentingan bisa berubah menjadi gerakan politik nyata di ruang publik. Akan tetapi tidak sedikit yang membesar dan terjadi di dalam media sosial saja. Salah satu faktornya ialah Kegiatan gerakan politik tersebut merupakan bentuk *political exposure* belaka, terlebih kalau isu dan tema yang diangkat tidak menarik sama sekali. Disisi lain, Aktivis digital juga berpotensi berpartisipasi dalam pembentukan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan. Dalam beberapa studi kasus yang pernah terjadi di Indonesia, Aktivisme digital muncul dari ketidakadilan hukum, ketidakpuasaan terhadap kinerja lembaga negara, atau dukungan politis.

Kasus aktivisme politik beberapa contohnya ialah, kasus Cicak versus Buaya pada 2012- 2013. Dimana gerakan masyarakat di media sosial dengan tajuk “Gerakan 1 Juta Pendukung KPK” #SelamatkanKPK, #KamiCicak, menjadi hal yang menarik dan perhatian dalam perpolitikan nasional. Partisipasi masyarakat terbentuk karna adanya

keterikatan publik (civic engagement). Adanya kesadaran politik di masyarakat terhadap kasus tersebut dimana pelemahan KPK membuat secara sosiologis, publik membela Lembaga KPK yang lahir atas tuntutan rakyat untuk melawan korupsi.

Partisipasi publik dalam basis kesukarelawanan, dapat dilihat pada kampanye-kampanye politik, Contoh dari kampanye politik yang populer ketika #salamduajari ketika kampanye pilpres tahun 2019 pasangan Jokowi-Amin. Dalam hal ini, pesan-pesan politik melalui transmisi sosial media tersebut memberikan pengaruh besar terhadap terbentuknya partisipasi publik baik yang sifatnya afiliasi maupun kontradiktif. Aktivisme politik secara sosial memang berkontribusi positif terhadap proses demokrasi dan deliberasi di Indonesia. deliberasi nilai-nilai demokrasi seperti halnya kesukarelaan (*voluntarism*), kesamaan (*egalitarian*), maupun juga praktik berjejaring (*networking*) menyebar dan diterima secara meluas dalam masyarakat. Dimana lingkup *cyberpolitics* dalam konteks sosial memungkinkan setiap warga untuk bertindak sebagai subjek yang mandiri dan autentik serta secara partisipatoris terlibat dalam proses pencarian, penyebaran, dan pertukaran informasi.

Kasus aktivisme yang populer secara internasional yakni kematian seorang aktivis muda Iran yang bernama Mahsa Amini. Dimana tagar #MahsaAmini menjadi trending topik dalam platform digital twitter. Dampak dari aktivisme digital atas kematian Mahsa Amini justru membuat dunia internasional menekan keadilan atas pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini diperjuangkan oleh kelompok-kelompok feminis di Iran. Bahkan tekanan tersebut membuat pemerintah Iran memblokir akses internet dan sosial media di negaranya

untuk membendung dari protes-protes yang terjadi di ruang siber.

Berdasarkan kasus aktivisme digital tersebut, pergeseran dari ruang publik dalam lingkup konvensional menuju arena *cyber* telah menimbulkan berbagai macam konsekuensi logis. Salah satunya ruang dan waktu dalam komunikasi ruang publik. Adapun teorisasi lama mengenai ruang publik menitikberatkan pada pola terbentuknya jaringan inklusif yang terjalin antar anggota kelompok elemen partisipasi publik. Namun kini dengan munculnya *cyberspace* sendiri kemudian memunculkan lebih banyak jejaring masyarakat sipil dalam negara bahkan lintas negara.

### **Aktivisme Digital Dalam Perspektif Partisipasi Publik Melalui Gerakan Sosial**

Menawarkan infrastruktur komunikasi yang fleksibel dan terdesentralisasi, Internet tampaknya memiliki kedekatan khusus dengan bentuk pengorganisasian yang lebih longgar yang menjadi ciri gerakan sosial. Memfasilitasi komunikasi yang cepat dan murah melintasi batas geografis, Internet dapat membantu mengubah ketidakpuasan menjadi aksi kolektif massa dengan cepat dan efisien. Platform digital dapat membantu gerakan sosial menemukan dan menyebarkan informasi, merekrut peserta, mengatur, mengoordinasikan, dan membuat keputusan. Namun, kemudahan dan kecepatan komunikasi virtual yang lebih besar ini tidak serta merta menghasilkan jaringan aktivis yang tahan lama dan stabil, setidaknya tidak dalam pengertian tradisional. Tetap saja, melakukan organisasi secara rutin pertemuan tatap muka, pemeliharaan ruang memori dan koordinasi online yang stabil, kerja sama seputar proyek yang terdefinisi dengan baik.

Pertama, catatan singkat tentang terminologi. Tidak hanya gerakan sosial merupakan konsep yang sulit untuk didefinisikan, tetapi istilah “gerakan sosial” sering digunakan untuk menggambarkan beragam fenomena terkait, termasuk peristiwa protes dan koalisi. Untuk menambah komplikasi lebih lanjut, Kemudian catatan singkat tentang terminologi. Tidak hanya gerakan sosial merupakan konsep yang sulit untuk didefinisikan, tetapi istilah “gerakan sosial” sering digunakan untuk menggambarkan beragam fenomena terkait, termasuk peristiwa protes dan koalisi.

Dalam mewakili bentuk aksi kolektif yang kompleks dan bertahan lama, gerakan sosial memiliki hubungan yang rumit dengan teknologi digital. Gerakan sosial melibatkan partisipasi masyarakat dengan sikap berbeda terhadap teknologi yang praktik daringnya berkembang seiring waktu. Dalam pemanfaatan media sosial, biasanya gerakan sosial melakukan hal tersebut untuk berbagai tujuan, termasuk mobilisasi, koordinasi, dan pembangunan komunitas. Dengan demikian, berfokus pada gerakan sosial dapat memberikan pandangan yang lebih luas dan komprehensif tentang peran Internet dalam aksi kolektif.

Memfasilitasi interaksi baik pada kelompok maupun pada individu ke individu, internet juga membantu para aktivis untuk membentuk dan membangun hubungan interpersonal dan rasa identitas kolektif. Aktivis dapat membagikan gambar, cerita, dan pernyataan yang menyampaikan misi gerakan, memperingati peristiwa penting, dan menyebutkan afiliasi dan lawannya. Internet selanjutnya memungkinkan para aktivis untuk berdiskusi dan berinteraksi seputar isu-isu ini dan untuk merefleksikan pengalaman bersama. Daftar email, grup



diskusi, komentar di *facebook*, *Instagram*, *twitter* dan YouTube semuanya berkontribusi pada proses mendefinisikan dan mengidentifikasi gerakan ini. Namun, diskusi online cenderung lebih rawan konflik daripada kontak tatap muka. Interaksi pada ruang siber sering kali melibatkan pertukaran hinaan daripada opini sebuah fenomena yang disebut "ujaran kebencian". Meskipun tingkat konflik diperlukan dan diharapkan dalam gerakan sosial apa pun, konflik dapat mengganggu komunikasi kelompok dan membubarkan hubungan kepercayaan.

Ruang aktivisme digital pada era modern ini, menciptakan ruang demokrasi pada suatu model representasi atau *representation democracy* untuk menghadirkan dan mengartikulasikan kepentingan publik yang begitu luas agar direalisasikan dalam bentuk kebijakan. Terlebih dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami kondisi penyempitan ruang sipil (*shrinking civic spaces*) terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi. *Freedom house* mencatat bahwa indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan ditahun 2021 skor indeks demokrasi di Indonesia turun kembali menjadi 59, yang menempatkan Indonesia pada kategori bebas sebagian (*partly free*). Gejala menyempitnya ruang sipil ini telah banyak dirasakan di kalangan masyarakat sipil, ditandai dengan semakin banyaknya kasus – kasus kriminalisasi terhadap aktor sipil, menggunakan pasal-pasal karet, misalnya dalam UU ITE, yang mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Selain itu, para aktor sipil juga kerap menerima berbagai bentuk ancaman, baik fisik maupun non-fisik. Di internet, bentuk-bentuk gangguan berupa *doxing*, perundungan dan ujaran

kebencian, telah lazim diterima oleh aktor sipil LP3ES, 2023).

Van de Monk menyebutkan bahwa “protes adalah aksi politik dari golongan yang tidak berdaya”, dan pada taraf tertentu, aktivisme merupakan salah satu cara untuk menyalurkan protes politik dan aspirasi masyarakat. Hal ini meningkatkan aspirasi warga negara dan memperkecil hirarki sosial tradisional antara golongan atas dan kelompok pemrotes. Teknologi informasi dan komunikasi memberikan ruang tidak hanya untuk partisipasi politik warga negara, namun juga memberikan ruang bagi diskusi politik, mengingat interaksi yang komunikatif adalah sangat penting dalam masyarakat demokratis. Oleh karena itu, aktivisme digital telah memberikan ruang untuk demokrasi yang meningkat tinggi lebih dari sebelumnya.

Keuntungan lain dari aktivisme yang dilakukan secara digital yakni *political engagement*,<sup>t</sup> adalah kemampuan untuk mengatasi halangan berupa keterbatasan dana, dimana internet menyediakan platform secara virtual dengan cuma-cuma. Penyebaran informasi juga dapat berjalan dengan segera dan *real-time*, menghasilkan koordinasi yang lebih lancar dan mobilisasi dari organisasi dalam skala global. Ruang dan waktu juga tidak lagi menjadi halangan, saat ini aktivis tidak perlu lagi berada di lokasi geografis yang sama untuk membuat aksi untuk isu yang sama. Bagi politik alternatif, internet telah menjadi ruang melawan hegemoni dimana warga negara dan kelompok pergerakan dapat bebas dari narasi yang dibawa oleh media mainstream. Internet juga memberikan kesempatan bagi penyebaran informasi yang biasanya akan ditekan oleh media *mainstream*.

Van de Donk juga berargumen bahwa organisasi pergerakan sosial bisa menjadi lebih efektif dibandingkan

dengan partai politik untuk membentuk opini publik. Pemimpin politik atau perusahaan dapat bertanggung jawab setiap saat, karena teknologi saat ini memungkinkan dokumentasi di tempat dari setiap peristiwa penting. Hal ini menguntungkan organisasi pergerakan sosial dalam menjalankan demonstrasi dengan lancar, karena aliran informasi yang cepat dapat mengurangi pengawasan pemerintah secara signifikan (Zahira, nd).

### **Aktivisme Digital di Berbagai Negara**

Di seluruh dunia, terbagi berbagai jenis dan tingkatan kebebasan dalam internet, terutama sebagai platform politik bagi masyarakat. Dalam internet, kita seharusnya dapat berbagi suara yang biasanya akan ditekan oleh media *mainstream*, tapi terdapat pula argumen mengenai batasan antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian (Ganesh, (2016). Teknologi mungkin mengubah dan memfasilitasi budaya aktivisme, namun tidak dapat menggantikan interaksi fisik dan partisipasi. Untuk sebagian warga negara, politik alternatif mungkin tidak akan dianggap sebagai suatu yang dapat dipercaya sebagaimana politik tradisional. Pemegang kekuasaan juga mempertanyakan komitmen dari aktivisme digital, seperti dalam beberapa kasus hal itu dijadikan sebagai ‘aktivisme keyboard’ atau ‘slacktivism’ (Moeti, (2017). Anggota pergerakan sosial tidak selalu tetap terlibat secara permanen dengan penyebab online, atau bahkan online. Jadi, membuktikan komitmen dan membangun koneksi kuat serta berkelanjutan dengan pemerintah atau jaringan aktivisme tidak mungkin hanya dengan internet saja.

### **Aktivisme Digital di Brazil**

Brazil memiliki jumlah populasi yang besar dan jumlah pengguna internet

yang relatif tinggi. Pada tahun 2012 saja, terdapat paling tidak 65 juta pengguna Facebook di Brazil, membuat negara tersebut menjadi pasar terbesar di luar Amerika Serikat. Brazil juga dikenal sebagai satu dari lima besar negara yang memiliki pengguna paling aktif Twitter (Statista (2016). Tingginya keterlibatan internet dan aktivitas digital mengarah pada terbentuknya lingkungan digital nasional dengan konektivitas tinggi di antara orang-orangnya. Jadi, aktivisme digital menjadi tren politik dari Brazil. Salah satu isu yang menarik perhatian Aktivis Digital Brazil adalah perihal kasus korupsi dalam pemerintahan Brazil. Strategi yang digunakan oleh aktivis bervariasi, termasuk mengorganisasi massa untuk demonstrasi, penyebaran meme politik, petisi, dan banyak lainnya.

Pada tahun 2009, untuk menyuarakan aspirasi terkait seberapa korupnya Kongres dan bagaimana peran dari Kongres tidaklah substansial secara konstitusional, sebuah inisiasi kampanye yang dikenal sebagai Gerakan Brazil menentang Korupsi Elektoral atau *Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral* (MCCE) didirikan. Gerakan ini diatur oleh organisasi non-pemerintah yang mengoordinasi 50 organisasi masyarakat sipil untuk meluncurkan koleksi tanda tangan sebagai dukungan inisiatif masyarakat demi meningkatkan profil dari kandidat yang mencalonkan diri untuk kantor legislative (Breuer & Welp, Y. (2014). Hal ini monumental, karena sejak September 2009 MCCE mengumpulkan paling tidak 1.5 juta tanda tangan fisik yang melebihi tanda tangan minimal yang diperlukan untuk memperkenalkan Hukum Warga Negara menentang Kongres. Selain tanda tangan fisik, MCCE juga menyertakan petisi online menyerukan Fichas Limpas Bill atau Clean State Bill untuk disahkan oleh Kongres, dan petisi tersebut mendapat

lebih dari 2 juta tanda tangan. Kelompok tersebut menggunakan Avaaz.org, sebuah organisasi advokasi yang mempromosikan aktivisme sipil. Puncak dari upaya ini adalah ketika media menangkap isu tersebut, dan perhatian tersebut memungkinkan penyebaran pesan ini yang memperkuat relevansi pertanyaan di antara masyarakat Brazil. Pada Juni 2010, Presiden Lula Da Silva meratifikasi undang-undang tersebut setelah disetujui oleh Kongres (Breuer & Welp, Y. (2014).

### **Aktivisme Digital di Korea Selatan**

Aktivisme digital, atau yang didefinisikan oleh Kang sebagai aktivisme internet di Korea Selatan, dimulai pada tahun 2002. Orang-orang menggunakan internet untuk menyuarakan kemarahan dan kekecewaan mereka setelah dua pelajar perempuan tanpa sengaja dibunuh oleh tentara Amerika Serikat (Kang, 2017). Melalui internet, seluruh anak muda Korea Selatan berhasil menyatukan sekelompok besar orang-orang untuk memberikan perhatian yang besar mengalihkan animo masyarakat yang tinggi pada Piala Dunia yang sedang berlangsung (yang bertempat di Jepang dan Korea Selatan) ke insiden ini. Harus dipahami bahwa aktivitas internet masyarakat di Korea Selatan sangat besar, tingkat *engagement* antar penggunaannya sangat tinggi, termasuk di dalamnya keterlibatan politik. Korea Selatan memiliki sistem internet yang maju, dan selama beberapa waktu terakhir negara ini selalu berada di urutan teratas sebagai negara dengan kecepatan rata-rata internet paling cepat dibandingkan dengan negara lain (Fast Metrics, 2017). Oleh karena itu, akibat dari paparan internet dan karena menjadi gaya hidup yang tidak dapat terpisahkan dengan anak muda, internet tidak dilihat sebagai domain virtual tak terbatas yang

terpisah dari tempat fisik yang sesungguhnya

Hampir seluruh warga negara Korea Selatan memiliki akses pada internet, dengan tingkat penetrasi internet sebesar 82% (Freedom House (2016). Meskipun demikian, walau kecepatan internet dan penetrasi tinggi, transparansi pemerintah dan keterlibatan demokratis tidak semaju teknologi mereka, penyebab yang sekarang sedang ditunjukkan oleh Aktivis Digital. Aktivisme digital di Korea Selatan dimulai terutama oleh anak muda, dan para remaja membawa praktik rutin online ke jalan ketika mereka mengedarkan pesan-pesan dan membuat pertunjukan yang menarik kelompok anak muda lainnya. Aktivis-aktivis digital ini membangun jaringan yang efisien dan aliansi sementara yang mengelilingi obyek-obyek keramaian dan menanggapi otoritas dengan aksi subversi yang kurang sopan.

Kemudian, di jalanan, praktik ini membangun mode partisipasi politik yang jelas yang bergerak melebihi permintaan dari demokratisasi kelembagaan, yang nantinya akan mengambil dampak politik yang lebih signifikan ketika tokoh-tokoh politik dan oposisi bergabung dalam unjuk rasa tersebut. Unjuk rasa internet besar-besaran terjadi lagi pada tahun 2008, dimana para aktivis muda menyuarakan kekecewaan mereka pada langkah-langkah Neoliberal yang dipaksakan dalam kesepakatan perdagangan baru antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Masalah pada kesepakatan perdagangan tersebut adalah persoalan impor 'sapi gila' dari Amerika Serikat ke Korea Selatan. Pemerintah menanggapi hal tersebut dengan janji untuk menuntut semua yang menyebarkan informasi palsu secara online beserta inisiator protes lilin. Reaksi tersebut menggambarkan bagaimana pemerintah

dan media mainstream menarik lensa interpretasi dari mobilisasi aktivis dan oposisi konservatif-progresif. Aktivis-aktivis digital ini, rupanya, tidak memberikan tanggapan dengan bahasa ideologi yang sama. Melainkan, kelompok ini meningkatkan aktivitas mereka dalam jangkauan dan keterhubungan baik online maupun di jalanan, mengalahkan pemerintah dengan keberadaan mereka, jaringan, dan sentuhan parodi (Kang, 2017b).

### **Aktivisme Digital di Afrika Selatan**

Aksi mengambil patung Cecil John Rhodes yang mewakili keberadaan sejarah apartheid dan kolonisasi merupakan tindakan simbolik. Sedangkan gambaran yang lebih besar tentang aktivitas tersebut adalah terkait pada dekolonisasi sistem pendidikan Afrika Selatan. Aksi simbolik tersebut menunjukkan keprihatinan yang berkembang dari para pelajar terkait diskriminasi sistemik yang condong dalam sebuah bentuk politik berbasis ras. Melalui narasi dan nuansa dari perlawanan yang disuarakan, Bickford tertarik pada bagaimana sosial media dalam konteks ini mampu dilihat sebagai ruang dimana pendirian teguh dan kenyamanan yang intim antara warga negara dapat berdampingan. Jadi, keterlibatan ini menghasilkan sejenis ‘warm impersonality’ yang merupakan hal pokok bagi kemungkinan terciptanya politik demokratis dalam sebuah pemerintahan yang beragam dan memiliki banyak tingkatan (Bickford, 2011).

Mellon Media dan Citizenship Project merilis sebuah data yang menarik di tahun 2013 yang dengan jelas memperlihatkan kurangnya minat dari anak muda terhadap aktivitas politik. Penelitian yang dilakukan oleh Garnan dan Asserman ini menemukan bahwa partisipasi dalam kegiatan sipil atau sosial lebih disukai daripada kegiatan politik. Kemudian, popularitas sosial

media mulai mewarnai kancah politik di Afrika Selatan, terutama di sekitar anak muda yang semakin bebas dalam menyuarakan diri dan mengekspresikan ketidakpercayaan terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini agaknya menjadi tantangan dalam kasus transisi negara demokratis seperti Afrika Selatan, karena media mainstream jarang memasukkan hal tersebut dalam perdebatan politik sosial, atau ekonomi disebabkan oleh hubungan yang pernah dijalin dengan pemerintah (Wasserman, 2012). Bertentangan dengan posisi media lokal negara, media internasional mungkin dapat mengangkat isu tersebut ke permukaan, khususnya dalam kasus yang berkaitan dengan legitimasi politik. Namun, di sisi lain hal ini menjelaskan alasan mengapa keterlibatan politik tidak terlihat sebagai suatu hal yang menarik bagi anak muda sehubungan dengan kurangnya visibilitas dalam media sehari-hari. Meskipun demikian, anggota dan pendukung dari #RMF menggunakan komunikasi sosial media untuk merepresentasikan diri, pengorganisasian diri, dan interaksi dengan kelompok dialog di luar seperti media mainstream, administrasi universitas, dan penentang dari kampanye. Sebagai tambahan untuk komunikasi resmi dari pergerakan, pengguna biasa juga menggunakan tagar untuk menimbulkan diskusi dan untuk menanggapi komentar (Bosch, 2016).

Setelah kampanye #RMF, orang-orang melanjutkan dengan protes “*Fee Must Fall*” (#FMF) yang dimulai sebagai jalan bagi mahasiswa untuk menyuarakan diri terkait dengan kenaikan biaya untuk pendidikan yang lebih tinggi. Namun, Bosch juga menambahkan bahwa protes harus dipertimbangkan pada latar belakang yang lebih luas dari pendanaan pemerintah yang menurun untuk pendidikan tinggi, bersama dengan

ketidaksetaraan sosio-ekonomi yang meluas serta konflik rasial. Selain itu, terlepas dari penciptaan ideal dari ruang-ruang yang memungkinkan diskusi bagi orang-orang untuk menyentuh isu-isu penting di Afrika Selatan, ketika ketegangan domestik meningkat, tidak menutup kemungkinan akan terjadi unjuk rasa jalanan yang menyebabkan bentrokan dan kecenderungan penggunaan kekerasan. Apabila dibandingkan dengan #RMF, kampanye #FMF menempatkan berbagai hal dalam perspektif ukuran bijaksana karena kampanye selanjutnya menarik sebanyak 1.3 juta tweet di Twitter namun dengan hampir hingga tanpa hasil yang berpengaruh dari perhatian luas. Ini merupakan kondisi yang disebut dalam buku cetak sebagai Slacktivism, atau konsep mengenai individu yang “berpartisipasi” aktif dalam aktivisme sosial dengan mengeklik tombol. Kasus aktivisme digital di Afrika Selatan memperdebatkan bahwa situs jejaring sosial seperti Twitter lebih cocok untuk hiburan daripada pengorganisasian politik (Morozov, 2012). Ini menambahkan wacana aktivisme digital di Afrika terutama dalam menarik perhatian anak muda. Sementara itu penting juga untuk menciptakan sarana tersebut, tanpa strategi jangka panjang, aktivisme dengan tujuan yang kurang jelas akan sangat mungkin memudar layaknya tren budaya belaka, bukannya menjadi komponen demokrasi dalam negara transisi.

## PENUTUP

Perkembangan dari *cyberpolitics* tak bisa dipungkiri menjadi sebuah perspektif baru dalam demokrasi. Perspektif ini menjadi “ruang baru” terjadinya interaksi politik, agenda politik, dan hal yang bersifat kepentingan politik terartikulasikan. Aktivisme politik dalam *cyberpolitics* memiliki

kekhasan dan kebaruan dalam partisipasi publik. Aktivisme digital menjadi gerakan yang kompleks, fleksibel, dan cair yang terdiri dari jaringan interaksi informal di antara beragam sub kelompok masyarakat. Sementara ruang siber membantu mereka mengatur dengan cara yang terdesentralisasi, Meskipun aktivisme digital tidak menjamin stabilitas dan kontinuitas. Dalam beberapa studi kasus, aktivisme digital menjadi sarana untuk mencapai suatu perubahan melalui sebuah penyampaian tuntutan yang terkoneksi dengan jutaan khalayak. Meskipun disadari bahwa gerakan sosial yang ada di masyarakat digital dapat berubah menjadi suatu gerakan nyata di ruang publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bickford, S. (2011). Emotion Talk and Political Judgment. *The Journal of Politics*, 73(4), 1025–1037.
- Bosch, T. (2016). Twitter activism and youth in South Africa: the case of #RhodesMustFall. *Information, Communication & Society*, 20(2), 221–232.
- Breuer, A. and Welp, Y. (2014). *Digital Technologies for Democratic Governance in Latin America*. 1st ed. New York: Routledge.
- Chon, M. G., & Park, H. (2020). Social media activism in the digital age: Testing an integrative model of activism on contentious issues. *Journalism and Mass Communication Quarterly*, 97(1), 72–97.
- Choucri, N. (2012). *Cyberpolitics in International Relations*. Cambridge: MIT Press.
- Dantes, N. (2012). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Zahira, D. *Memetakan Aliran Aktivisme Digital*. Center for Digital Society.

- Fast Metrics (2017). Internet Speeds by Country - Fastest Internet In The World Map. [daring] *Fastmetrics.com*. Tersedia di: <https://www.fastmetrics.com/internet-connection-speed-by-country.php#top-10-comparison-2017> [Diakses pada 31 Des. 2022].
- Freedomhouse.org. Tersedia di: <https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2016/southkorea> [Diakses pada 31 Des. 2022].
- Ganesh, M. I. (2016). The New Green: The Landscapes of Digital Activism. *Arrow for Change*, 22(1), 2–6.
- Nawawi, H. (1997). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indrawan, J. (2019). Cyberpolitics sebagai Perspektif Baru Memahami Politik di Era Siber. *Jurnal Politica*, 10(1).
- Joyce, M. (Ed.). (2010a). *Digital activism decoded: the new mechanics of change*. New York: International Debate Education Association.
- Joyce, M. (2010b). Introduction: how to think about digital activism. In M. Joyce (Ed.), *Digital Activism Decoded: The New Mechanics of Change*. New York, NY: International Debate Education Association.
- Kang, J. (2017a). *Igniting the Internet: Youth and Activism in Postauthoritarian South Korea*. 1st ed. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Kang, J. (2017b). Internet Activism Transforming Street Politics: South Korea's 2008 'Mad Cow' Protests and New Democratic Sensibilities. *Media, Culture & Society*, 39(5), pp.750–761
- Kompas, Riset Ungkap Lebih dari Separuh Penduduk Indonesia "Melek" Media Sosial, diakses pada 5 November 2022, <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/24/08050027/riset-ungkap-lebih-dari-separuh-penduduk-indonesia-melek-media-sosial>
- Lim, M. (2013). Many clicks but little sticks: social media activism in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 43(4), 636–657.
- LP3ES, Ruang Aktivisme Digital dan Gerakan Sosial, diakses pada 1 Januari 2023, <https://www.lp3es.or.id/2022/08/23/ruang-aktivisme-digital-dan-gerakan-sosial/>
- Micheletti, M. Discursive political consumerism and political participation. Ecpr.Eu. <https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/faea2793-53be-4573-9b88-778a5eeda26b.pdf>
- Moeti, K. (2017). Digital Activism Comes of Age: Technology is Creating New Space for Marginalized Voices. [daring] *Huntington Post*. Tersedia di: <https://www.huntingtonpost.com/entry/digital-activism-comes-of-age-technology-is-creating-us-590b498ae4b046ea176ae884> [Diakses pada 31 Dec. 2022].
- Morozov, E. (2012). *The Net Delusion*. 2nd ed. London: Penguin.
- Smith, M. (2015). *Research Handbook on International Law and Cyberspace*. Massachusetts: Edwar Elgar Publishing Limited.
- Statista (2016). Topic: Internet Usage in Brazil. [daring] *www.statista.com*. Tersedia di: <https://www.statista.com/topics/2045/internet-usage-in-brazil/> [Diakses pada 31 Des. 2022].
- Wasserman, H. (2011). Mobile Phones, Popular Media, and Everyday African Democracy: *Transmissions and Transgressions*. *Popular Communication*, 9(2), 146–158.